

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapatlah di tarik kesimpulan terkait dengan pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Kinerja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai kurang optimal dalam upaya mengembangkan Potensi wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini terlihat dari Perencanaan Dinas Pariwisata yang tidak terarah pada program prioritas hanya sebatas blue print dikarenakan direvisinya RPJMD dan belum didistribusikan ke semua SKPD yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten sehingga tidak adanya arah pembangunan 5 (lima) Tahun kedepan, Kebijakan pariwisata yang tidak melibatkan semua elemen pendukung pariwisata dimulai dari DPRD yang sampai saat ini belum membuat produk hukum yang mengatur tentang kepariwisataan, tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata, minat para investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata khususnya dalam pembangunan obyek wisata masih rendah disebabkan kasus yang mencuat di Kabupaten Pulau Morotai akhir-akhir ini yaitu tidak efektifnya keamanan dan pelaku pembangunan sektor kepariwisataan belum berperan secara optimal (SDM) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai. Serta target dan realisasi

masih jauh dari pencapaian yang di inginkan, terlihat dari jumlah pendapatan daerah dari segi pariwisata yang hanya berkisar Rp. 7.120.000.- serta adanya efek ketergantungan yang tinggi terhadap APBD yaitu sebesar Rp 3.348.909.532.- namun realisasi dari APBD pun hanya pada pengurusan administrasi perkantoran semata.

2. Dampak dari buruk Kinerja dan Strategi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai menyebabkan kurangnya minat wisatawan yang berkunjung mulai dari Wisman dan Wisatawan domestik di karenakan Kabupaten Pulau Morotai tidak terekspos secara luas, hanya di akhir tahun 2012 saja ketika diadakan *Ivent* Sail Morotai 2012, namun pasca Ivent tersebut tidak ada kelanjutan dalam upaya menarik wisatawan, Fasilitas Pariwisata yang kurang memadai karena tidak berdasar pada Sapta Pesona Sadar Wisata (aman, tertib, bersih, dan kenangan) dan minimnya sarana insfarstruktur dan Suprastruktur yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.
3. Strategi Pengembangan Potensi wisata di Kabupaten Pulau Morotai diharapkan mampu untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Pulau Morotai sehingga terciptanya lapangan kerja didaerah dan mampu mendorong pendapatan asli daerah. Namun prseptif pengembangan pariwisata tidak sejalan dengan konsep yang dibangun yaitu menciptakan morotai sebagai destinasi wisata dunia, wisata bahari dan wisata sejarah karena belum adanya kesiapan dari pemerintah daerah, Selain itu, posisi dari Dinas pariwisata tidak mampu mengembang amanah dan tanggung jawab yang terlalu besar yang untuk itu dibutuhkan sinergitas dari semua

elemen pendukung, serta pola kegiatan dari dinas pariwisata kabupaten Pulau Morotai yang hanya melakukan promosi dan itupun hanya pada teritorial Propinsi Maluku Utara saja. Dikarenakan akses dalam bentuk promosi di media massa ataupun elektronik belum ada dan tidak adanya kordinasi antara Dinas Pariwisata dengan pihak swasta, masyarakat dan elemen pendukung pariwisata lainnya.

## **VI.2. Saran**

Dari beberapa kesimpulan tersebut diatas adapun saran dari peneliti terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai haruslah mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan daerah hal itu tercermin dari peningkatan kinerja dari Dinas Pariwisata mulai dari program perencanaan yang matang, kebijakan yang mampu melibatkan semua elemen artinya artinya ada sinergitas dari semua elemen kelembagaan, diantaranya penguatan fungsi legislasi dari DPRD, penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan pariwisata, mampu menumbuhkan kepercayaan kepada infestor sehingga target dan realisasi yang diinginkan dapat tercapai yaitu dapat mendorong pertumbuhan pariwisata yang ada.
2. Prseptif pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kondisi obyektif yang ada dilapangan, sehingga tidak ada kekecewaan dari para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pulau Morotai, dan diharapkan

pula Dinas Pariwisata haruslah bekerja ektramaksimal dalam mempromosikan potensi dan obyek wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai sehingga Grand Visi dari Bupati yaitu Morotai berbasis Pariwisata dan Perikanan dapat terjewantahkan dalam tahapan implementasi.

3. pelaporan kinerja dilakukan haruslah dengan mengacu pada prinsip dan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berasaskan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas serta disampaikan secara terbuka kepada public, agar mendapat gambaran secara obyektif mengenai perkembangan kinerja pembangunan pariwisata secara utuh, Sehingga public dapat melihat keterkaitan dan konsistensi perumusan dan pelaksanaan visi, misi dan program kerja.